DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Latif, 2016. *Hukum Adminstrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Andi Hamzah, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Aria Zurnetti, *Et. Al*., 2021. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat*. Depok: Rajawali Pers.

Djuyamto, 2025. *Konsep Kewenangan Hakim dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Fakta Persidangan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.

Edita Elda, 2007. *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*. Depok: Rajawali Pers.

Elwi Danil, 2011. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasanal Mulkan, 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: CV. Amanah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Leden Marpaung, 2005. *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Adiguna Bimasakti,. *Buku Saku Hukum Pidana Indonesia (Termasuk Hukum Acara Pidana dan Pidana Militer)*, Cirebon: JDIH Kabupaten Cirebon.

Muhammad Syarif, *Et. Al*., 2024. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Get Press Indonesia.

Muhammad Yusni, 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Nur Laely dan Angga Rizka Lidiawan, 2022. *Metodologi Penelitian Menyiapkan Penelitian dan Menulis Karya Ilmiah*. Cirebon: Yayasan Wiyata Bestari Samasta.

Soerjono Soekanto, 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publising.

Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Wiwik Sri Widiarty, 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Kota Yogyakarta: Publika Global Media.

Zulkifli Ismail, 2023. *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

B. JURNAL

Afridus Darto, *Et. Al.,* 2023. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiawaan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 1. No. 2. 2023.

Edita Elda, 2019. Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 2. 2019.

Ekky Aji Prasetyo, *Et. Al*., 2024. Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 7. No. 1. 2024.

Emmy Evelina Marpaung, 2025. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 2. No. 5. 2025.

Erwin Susilo dan Dharma Setiawan Negara, 2025. Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 16. No. 2. 2025.

Hikmatus Syuraida, 2015. Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Hera Reformasi. *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah*. Vol. 3. No. 2. 2015.

Mudemar A. Rasyidi, 2014. Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol. 6. No. 2. 2014.

Novaldy Franklin Makapuas, 2019. Pencarian Kebenaran Material dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*. Vol. VIII. No. 8. 2019.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Nurhasan, 2017. Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.* Vol.17. No. 3. 2017.

Reza Hidayat, 2015. Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi). *Katalogis*. Vol. 3. No. 12. 2015.

Rizky P.P Karo Karo, 2023. Interpretasi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023. *Jurnal Yudisial*. Vol. 16. No. 3. 2023.

Vananda Putra, *Et. Al*., 2023.Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg. *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 1. 2023.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

D. PUTUSAN

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg.

Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2023.

E. INTERNET

Bandung Bergerak Bercerita dari Pinggir, "Korupsi, Warisan belanda yang Masih Lestari hingga Kini", https://bandungbergerak.id/article/detail/2775/korupsi-warisan-belanda-yang-masih-lestari-hingga-kini , dikunjungi pada 14 Oktober 2025 Jam 16.30.

Berita Beta. Com, "Salah Bayar Ganti Rugi Pengadaan Tanah dapat Dipidana", https://beritabeta.com/p/salah-bayar-ganti-rugi-pengadaan-tanah-dapat-dipidana/all, dikunjungi pada 27 Juli 2026 Jam18.23.

Cakaplah, "Kejati Sumbar Eksekusi Terpidana Kasus Tol Padang-Pekanbaru, 8 Lainnya Diminta Serahkan Diri", https://www.cakaplah.com/berita/baca/101044/2023/08/02/kejati-sumbar-eksekusi-terpidana-kasus-tol-padangpekanbaru-8-lainnya-diminta-serahkan-diri#sthash.6dYBrCvm.JaKBy3Bs.dpbs, dikunjungi pada 19 Januari 2026 Jam 07.18.

Hukum Online, "Mengenal Judex factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan", https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/, dikunjungi pada 7 Juni 2026 Jam 00.37.

JDIH MA, “Menakar “Res Judicata Pro Veritate Habetur” dalam Konteks Putusan Hakim di Pengadilan”, https://jdih.mahkamahagung.go.id/tulisan-hukum-detail/menakar-res-judicata-pro-veritate-habetur-dalam-konteks-09p, dikunjungi pada 29 Juli 2026 Jam 08.00.

KPK, “Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi”, https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi , dikunjungi pada 21 Oktober 2025 Jam 13.00.

F. KAMUS

KBBI Daring, s.v. , “Kamus”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi, dikunjungi pada tanggal 27 November 2025 Jam 01.34

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA